

405

PENDUDUK DAN USAHA TRANSMIGRASI DI INDONESIA

Abdul KADIR*

PENGANTAR

Suatu gejala umum yang timbul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang melanda hampir setiap negara yang termasuk dalam kategori "Dunia Ketiga" adalah penambahan penduduk yang besar. Indonesia mengalami masalah yang sama, yang dapat dilihat dari tiga data sensus penduduk yang dilakukan oleh Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1961, 1971 dan yang terakhir 1980. Menurut Sensus Penduduk 1961, Biro Pusat Statistik mencacah 97.019.000 jiwa, tahun 1971 tercatat 119.369.000 jiwa sedangkan hasil Sensus Penduduk 1980 tercatat sebanyak 147.490.298 jiwa. Hal ini menunjukkan perkiraan rata-rata tingkat perkembangan per tahun pada periode 1961-1971 sebesar 2,1% dan 2,3% untuk periode 1971-1980.

Selain dari sensus penduduk, maka dapat diperoleh pula keterangan tentang banyaknya penduduk dari Survei Penduduk Antar Sensus (Supas 1976) untuk tahun 1976, yang setelah dilakukan perapihan menghasilkan perkiraan jumlah penduduk 130.232.000 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat penambahan penduduk pada jangka waktu 1971-1976 mencapai 2,0%. Walaupun angka tingkat penambahan penduduk Indonesia belum atau tidak mencapai tingkat setinggi negara-negara Amerika Latin (sampai 3%), kenaikan penambahan penduduk masih dianggap terlalu tinggi.

Di samping tingkat penambahan penduduk yang tinggi masalah kependudukan yang juga dihadapi Indonesia adalah penyebaran geografis penduduk yang sangat tidak seimbang. Sebagai contoh pada tahun 1980 (Hasil Sensus Penduduk 1980) dari 147,5 juta jiwa yang diperkirakan mendiami Kepulauan Indonesia dengan luas areal seluruhnya sekitar 1.904.569 km² sekitar 61,9% di antaranya bertempat tinggal di Jawa dan Madura yang luas tanah seluruhnya

hanya sekitar 132.187 km² atau kurang lebih 6,94% dari seluruh luas Indonesia. Sebaliknya pulau-pulau di luar Jawa-Madura yang luas seluruhnya lebih dari 93% luas seluruh Indonesia, didiami hanya oleh kurang dari 39% penduduk Indonesia. Di antara pulau-pulau ini antara lain, Sumatera yang luasnya 24,87% dari seluruh luas wilayah Indonesia berpenduduk hanya 19% dari seluruh penduduk Indonesia. Daerah Indonesia lainnya, Kalimantan dan pulau-pulau lain yang luas wilayahnya berturut-turut 28,32% dan 39,87% didiami hanya oleh 4,50% dan 7,50% penduduk Indonesia. Di antara pulau lain ini, Irian Jaya yang paling jarang penduduknya yaitu hanya berpenduduk kurang dari 1% walaupun luasnya lebih dari 22,16%. Pulau besar lainnya, Sulawesi berpenduduk sekitar 7,10% sedang luasnya hampir 10% luas Indonesia.

Karena tidak meratanya distribusi penduduk di Indonesia, kepadatan penduduk antara pulau satu dengan lainnya sangat berbeda. Kepadatan penduduk di Jawa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain.

Keadaan mencengnya distribusi penduduk secara geografis ini telah menimbulkan masalah kependudukan dan masalah-masalah lain yang diakibatkannya yang sangat berbeda sifatnya antara Jawa dan Luar Jawa. Pertambahan penduduk yang tinggi dan padatnya penduduk di Jawa telah menyebabkan makin menyempitnya pemilikan-areal tanah pertanian.

Walaupun banyak penduduk pedesaan telah meninggalkan desanya pergi ke kota tetapi karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani rata-rata pemilikan tanah di Jawa sangat sempit. Sensus Pertanian 1973 menunjukkan bahwa di Jawa rata-rata pemilikan tanah adalah 0,64 hektar per keluarga petani. Lagi pula distribusi tanah pertanian rakyat di semua propinsi terletak dalam ketimpangan yang tinggi. Di samping itu jumlah petani yang kekurangan tanah sangat besar, yang meliputi 16,0% dari seluruh usaha tani di Jawa. Masalah ini menjadi lebih parah karena terdapatnya pula gejala distribusi pemilikan tanah yang tidak merata (BPS, 1977). Karena penambahan areal tanah pertanian di Jawa secara relatif boleh dikatakan sudah tidak mungkin lagi, keadaan menyempitnya tanah pertanian membawa akibat pada merosotnya produktivitas per orang, penebangan-penebangan hutan lindung secara liar yang berakibat pada makin meluasnya tanah-tanah kritis, pemakaian tanah-tanah di bukit-bukit yang curam yang menyebabkan makin parahnya erosi/banjir dan secara keseluruhan mengancam kelestarian alam. Hal yang lebih luas yang ditimbulkannya adalah makin banyaknya pengangguran dan setengah pengangguran dan urbanisasi karena tekanan penduduk di daerah pedesaan. Dan dengan tidak dapatnya daerah perkotaan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, masalah pengangguran dan cepatnya urbanisasi tersebut akan menyebabkan teriadinya masalah-masalah sosial yang

Di lain pihak pulau-pulau di Luar Jawa (kecuali Bali dan Lombok), yang masih mempunyai sumber daya alam yang besar, tidak dapat berkembang karena kekurangan tenaga kerja dan pemakaian teknologi pertanian yang masih rendah di samping faktor alam yang memang berbeda dengan di Jawa. Karena itu pengembangan daerah-daerah di Luar Jawa selalu tertinggal dari perkembangan ekonomi Pulau Jawa sehingga menimbulkan ketidakmerataan tingkat perkembangan antar daerah-daerah di Indonesia. Di samping itu jarang penduduk di Luar Jawa tersebut juga akan menimbulkan peluang yang lebih besar akan terjadinya infiltrasi-infiltrasi dari negara lain. Hal ini tentu saja akan membahayakan keamanan negara Indonesia.

KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN

Persoalan yang ditimbulkan oleh masalah kependudukan tersebut jelas tidak mungkin dipecahkan hanya dengan pembangunan ekonomi seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang sekarang sudah maju. Secara sadar masalah kependudukan harus dapat diatasi untuk dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi. Secara logis usaha untuk lebih pemeratakan distribusi penduduk menurut wilayah geografis Indonesia adalah dengan memindahkan penduduk dari Jawa ke Luar Jawa, seperti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan malahan sudah sejak jaman kolonial. Tetapi usaha memindahkan penduduk dari Jawa ke Luar Jawa dengan tujuan untuk lebih pemeratakan penyebaran penduduk Indonesia, mempunyai kelemahan-kelemahan pokok.

Untuk lebih pemeratakan distribusi penduduk sejumlah besar penduduk di Jawa harus dipindahkan jika mungkin harus lebih besar dari angka jumlah pertambahan penduduk di Jawa sendiri. Hal ini memerlukan usaha besar-besaran dan memerlukan daya dan dana yang besar sekali. Selama sejarah pemerintahan hanya dapat memindahkan sebagian kecil saja dari penduduk Jawa. Usaha memindahkan penduduk secara besar-besaran dengan target supaya penyebaran penduduk lebih merata sudah disadari oleh pemerintah pada waktu itu. Selama ini rata-rata per tahun hanya bisa dipindahkan penduduk sebanyak 2,7% dari angka pertambahan penduduk Jawa, sedang paling tinggi dalam suatu tahun hanya bisa diperoleh sebanyak 6,8% saja.

Usaha pemindahan penduduk Jawa ke Luar Jawa tanpa dibarengi dengan kebijaksanaan lain akan menyebabkan pulau-pulau di Luar Jawa dalam jangka waktu panjang akan mengalami nasib yang sama seperti Jawa, yaitu akan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi karena akan adanya "ledakan penduduk" di Luar Jawa. Karena itu disadari penyelesaian masalah kepen-

penduduk yang tinggi, baik di Jawa maupun di Luar Jawa. Pertambahan penduduk yang tinggi akan berakibat melipatgandakan jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Jelas bahwa penekanan pertambahan penduduk yang tinggi ini sangat mendesak untuk dilakukan di Jawa. Hal ini sudah sejak akhir tahun 1960-an dilakukan oleh pemerintah dan badan-badan swasta, terutama sejak dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1969. Penekanan pertambahan penduduk yang cepat di Luar Jawa juga diperlukan untuk menghindari efek berganda dari pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut dan mengingat persentase tanah yang bisa didiami tidak setinggi di Jawa walaupun daerahnya relatif sangat luas sekali.

Kebijaksanaan pemindahan penduduk Jawa ke Luar Jawa yang hanya semata-mata untuk pemerataan penyebaran penduduk akan berarti hanya memindahkan masalah-masalah yang ada di Jawa ke Luar Jawa. Masalah mengelompoknya penduduk hanya pada tempat-tempat yang relatif subur akan menyebabkan padatnya daerah-daerah tersebut. Masalah kemiskinan yang ada di Jawa akan terbawa ke Luar Jawa karena umumnya mereka yang dipindahkan adalah mereka yang sangat memerlukan untuk dipindahkan, yaitu mereka yang berasal dari daerah yang padat, daerah miskin/daerah minus/atau daerah kritis. Secara umum dapat dikatakan pemerataan distribusi penduduk secara demikian cenderung untuk memindahkan penduduk "marginal" karena apa yang akan mereka peroleh di tempat baru juga sangat minim. Ini disebabkan karena dengan dana yang terbatas jumlah penduduk yang dipindahkan harus banyak. Dengan fasilitas yang minim dengan sendirinya penduduk yang tertarik untuk pindah adalah penduduk yang relatif di tempat asal sudah tidak punya harapan untuk bisa hidup dengan baik. Penduduk demikian kurang mempunyai motivasi dan keahlian untuk mengembangkan daerah barunya. Akibatnya keadaan ekonomi dan penghidupan mereka tidak cepat berkembang membaik, sehingga umumnya tidak dapat/kurang menarik pendatang-pendatang baru secara spontan. Karena itu kebijaksanaan pemindahan penduduk tidak boleh hanya karena alasan ingin lebih pemerataan penyebaran penduduk Indonesia, tetapi harus mempunyai objective yang lebih luas. Malahan aspek pemerataan ini seharusnya hanya merupakan hasil sampingan saja dari program pemindahan penduduk Jawa ke Luar Jawa.

KEBIJAKSANAAN TRANSMIGRASI

Selama penjajahan Belanda keharusan untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Luar Pulau Jawa sudah dirasakan, dan pada permulaan abad ke-20 Pemerintah Kolonial Belanda mulai memindahkan penduduk dari

apa yang dinamakan "Kolonisasi" yaitu untuk membentuk daerah-daerah koloni oleh pendatang-pendatang dari Pulau Jawa di pulau-pulau lain. Sedikit banyak motivasi kebijaksanaan kolonisasi ini adalah juga untuk mengurangi tekanan penduduk di Pulau Jawa. Pemerintah juga menyadari keuntungan-keuntungan pada masa yang akan datang menyebarkan tenaga kerja ke pulau-pulau lain khususnya Sumatera. Tetapi kenyataannya program kolonisasi tersebut baru dimulai setelah beberapa perusahaan perkebunan Belanda mulai meluaskan usahanya di Sumatera, dan ketika kesukaran untuk memperoleh buruh yang lebih murah di Sumatera sudah dirasakan.

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu selama perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda, sudah dipikirkan rencana untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau-pulau lain. Meskipun selama 25 tahun pertama sesudah kemerdekaan sering terjadi perubahan dan juga pelaksanaan program tersebut belum pernah berhasil, perhatian pemerintah terhadap proyek ini selalu ada. Baru pada Pelita II dan III (1974/1975 - 1978/1979 dan 1979/1980 - 1983/1984) program tersebut mendapat perhatian yang lebih serius. J.M. Hardjono dalam bukunya "Transmigration in Indonesia" telah menulis secara lengkap perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali ini yang sesudah kemerdekaan dinamakan "Transmigrasi". Panitia Siasat Ekonomi dibentuk pada tahun 1974, untuk menelaah hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian nasional, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang transmigrasi, meskipun tidak ada sesuatu pun yang dapat dilaksanakan selama waktu tersebut. Sejak saat itu transmigrasi ditempatkan di bawah instansi yang berbeda-beda seperti yang terlihat di bawah ini:

Tahun	Departemen/Menteri yang Membawahi Transmigrasi
1974	Menteri Perburuhan dan Kesejahteraan Sosial kemudian dipindahkan menjadi di bawah Menteri Pembangunan dan Pemuda.
1948	Menteri Dalam Negeri.
1950	Menteri Pembangunan Masyarakat, kemudian dipindahkan ke Menteri Kesejahteraan Sosial pada tahun yang sama.
1957	Menteri Negara Urusan Transmigrasi.
1960	Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan
1962	Departemen Koperasi
1963	Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan
1964	Departemen Transmigrasi dan Koperasi.
1966	Sesudah pergolakan politik tahun 1965, berada di bawah Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi).
1967	Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
1968	Departemen Transmigrasi dan Koperasi.
1973	Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi

Seringnya perubahan pertanggungjawaban terhadap transmigrasi adalah refleksi dari kurang stabilnya politik di dalam negeri dan adanya perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan terhadap penanganan program transmigrasi selama 25 tahun sesudah kemerdekaan. Hal ini juga menunjukkan kurangnya pengertian terhadap masalah kependudukan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Pada waktu itu menyadari tidak adanya alternatif lain dirasakan bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi tekanan penduduk di Pulau Jawa adalah dengan memindahkan penduduk dari Jawa ke pulau lainnya paling sedikit sama dengan penambahan penduduk secara alamiah di Jawa. Dan jika kepadatan penduduk di Jawa sudah berkurang, maka makin sedikit penduduk yang harus dipindahkan ke pulau lainnya. Sebagai contoh adalah suatu target yang ambisius untuk membatasi penduduk Pulau Jawa menjadi 31 juta yang akan dicapai pada tahun 1987. Hal ini berarti suatu tugas memindahkan hampir 60 juta penduduk dalam periode 35 tahun. Ada juga suatu target untuk memindahkan 2 juta penduduk dalam 5 tahun, yang kemudian diikuti dengan target 8 tahunan dari Bappenas (1961-1968) untuk memindahkan penduduk sebanyak 15 juta dalam periode waktu tersebut.

Target yang ambisius terus saja dipertahankan walaupun kenyataannya hanya puluhan ribu penduduk saja yang dapat dipindahkan setiap tahun, yang berarti tidak jauh di atas jumlah yang dicapai selama periode jaman kolonial. Jumlah terbesar yang dicapai adalah kurang lebih 53.000 penduduk yang dapat dipindahkan ke pulau lain. Ini berarti hanya lebih tinggi 1.000 orang daripada jumlah terbesar yang dipindahkan pada jaman kolonial (Sri Ediswasono, 1970). Program transmigrasi hanya dilihat sebagai suatu cara untuk mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa, tanpa melihat adanya interaksi dari variabel ekonomi dan penduduk. Pengaruh faktor kependudukan terhadap pembangunan ekonomi, dan pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk tidak dipahami dengan baik.

Sejak Pelita I (1969-1973) transmigrasi sudah dianggap tidak hanya bermaksud untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau-pulau yang padat penduduknya, tetapi lebih daripada itu juga sebagai dorongan terhadap pembangunan regional khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Secara keseluruhan rencana pembangunan nasional pada Pelita I difokuskan pada pembangunan regional dan pembangunan sektor pertanian. Pembangunan di sektor pertanian adalah dengan tujuan utama untuk swasembada beras dengan cara intensifikasi (terutama di Jawa), diversifikasi cara menanam dan membuka areal pertanian baru di Luar Pulau Jawa dan Bali. Dalam hubungan ini program transmigrasi sangat relevan untuk perluasan tanah per-

kan bahwa sejak Pelita I, transmigrasi sudah ditempatkan pada perspektif yang lebih luas dalam rencana pembangunan regional:

"Dalam pelaksanaan Repelita, transmigrasi dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas pembangunan dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian diadakannya transmigrasi adalah untuk mendukung pembangunan dan proyek-proyek yang membutuhkan tenaga kerja pada propinsi yang bersangkutan."

Transmigrasi sekarang lebih dipandang sebagai program pembangunan daerah, terutama daerah pedesaan di Luar Jawa. Selama periode waktu tersebut terdapat suatu usaha untuk mengintegrasikan program transmigrasi ke dalam pembangunan sumber-sumber alam yang ada di propinsi tersebut. Untuk pelaksanaan proyek-proyek regional dan nasional yang ada di propinsi tersebut, program transmigrasi membantu menyediakan tenaga kerja dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Di samping itu, proyek ini juga bermaksud untuk mempertinggi rasa persatuan nasional dan penduduk Indonesia yang terdiri dari banyak suku. Dengan dibukanya daerah-daerah pemukiman baru, dan dengan membolehkan penduduk asli setempat untuk pindah ke dalam daerah pemukiman baru tersebut, terbuka kesempatan bagi penduduk dari suku yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama dan berasimilasi dengan cepat. Juga interaksi daerah transmigrasi dengan desa-desa lain di sekitarnya untuk aktivitas sosial dan ekonomi, akan berkembang lebih baik di antara mereka, sehingga dapat diharapkan untuk membantu memelihara dan mempertinggi persatuan nasional.

Proyek transmigrasi juga bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Di dalam Doktrin Pertahanan dan Keamanan Indonesia, semua penduduk Indonesia (tergantung kepada kesanggupannya) adalah bertanggung jawab untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini antara lain dapat dicapai dengan mengisi daerah-daerah yang masih kosong atau jarang penduduknya melalui transmigrasi. Daerah-daerah tersebut dapat membentuk masyarakat yang kuat di Luar Jawa dan Bali yang akan berkembang menjadi pusat pertahanan jika ditinjau dari sudut pertahanan dan keamanan nasional.

Ringkasnya hal tersebut disebutkan dalam Undang-undang Transmigrasi No. 3 tahun 1972 tentang "Prinsip Dasar Transmigrasi" bahwa secara umum program transmigrasi ditujukan untuk mencapai migrasi spontan yang teratur dan dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai:

- a. Meningkatnya taraf hidup;
- b. Pembangunan regional;
- c. Distribusi penduduk yang lebih merata;
- d. Penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia;
- e. Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;
- f. Memperkuat persatuan dari penduduk Indonesia;

Program transmigrasi terutama diharapkan untuk memberikan sumbangan yang berarti untuk pembangunan regional dalam konteks program pembangunan nasional secara keseluruhan. Melalui program transmigrasi tidak hanya kebutuhan akan tenaga kerja dan pekerja-pekerja yang terlatih dapat terpenuhi, tapi pemukiman kembali tersebut juga dapat berarti pembangunan suatu masyarakat baru. Masyarakat pedesaan di Jawa dan Bali yang hidup secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya cenderung untuk tetap dan statis. Mereka sudah dipengaruhi oleh kondisi kehidupan dan lingkungan di desa tersebut. Kehidupan seperti ini, tentu saja tidak akan membantu untuk kelancaran pembangunan di desa tersebut dan masyarakat, yang membutuhkan adanya perubahan dalam harkat dan perilaku penduduk untuk menyokong proyek pembangunan daerah tersebut dan untuk mengikuti proses pembangunan yang mempengaruhi mereka. Program transmigrasi adalah memindahkan penduduk ke daerah baru. Dengan begitu terjadi interaksi antara transmigrasi dan penduduk asli seperti halnya antar masyarakat transmigrasi sendiri dalam menghadapi tantangan baru yang dapat membangun dan menghasilkan nilai-nilai dan tradisi baru yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Tentu saja hal ini harus diimbangi dengan usaha untuk memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan yang berguna bagi mereka.

USAHA MEMINDAHKAN PENDUDUK DARI JAWA KE LUAR JAWA

Sudah sejak lama masalah transmigrasi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jawa-Madura, menjadi pemikiran dan pengkajian dari berbagai instansi dan berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Sir Thomas Raffles (1814) dan Du Bus de Gisignees (1827) telah melihat tanda-tanda kelebihan penduduk di Jawa dan meramalkan terjadinya migrasi penduduk dari Jawa ke Luar Jawa. Teori mereka pada dasarnya sangat sederhana, yaitu tanah di Jawa yang sangat terbatas tidak akan mampu menampung penduduk yang bertambah dengan cepat. Dengan perkataan lain, luas tanah pertanian per petani akan menurun sehingga kemakmuran menurun. Pemandahan penduduk ke daerah-daerah yang lebih rendah kepadatannya merupakan konsekuensi logis dan yang paling mudah diselenggarakan, untuk menaikkan kesejahteraan.

Semenjak Raffles dan Du Bus itulah keadaan dan masalah penduduk di Jawa mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas. Pada akhir abad ke-19 dan pada tahun pertama dari abad ke-20, kekuatiran tentang bahaya kelebihan penduduk di Jawa makin meluas, baik di kalangan rakyat banyak maupun di kalangan resmi yaitu Pemerintah Kolonial Belanda, hingga diadakan kolo-

Pelaksanaan kolonisasi dijalankan, karena adanya kesadaran tentang kekurangan tanah yang akan dipergunakan untuk sektor pertanian. Usaha kolonisasi diadakan, setelah terjadinya serangkaian penyelidikan-penyelidikan tentang pertambahan penduduk, perubahan-perubahan pada tanah pertanian per kapita, tentang pendapatan dari angkatan kerja, tentang perjanjian-perjanjian penggunaan tanah dan kesejahteraan petani. Hal ini juga merupakan perwujudan dari usul Van Deventer agar "Pendidikan, Irigasi dan Migrasi" dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup penduduk di Pulau Jawa.

Bulan September 1902, Residen Sukabumi G.H. Heyting memperoleh instruksi dari Pemerintah Hindia Belanda untuk mempelajari sedalam-dalamnya perihal pemindahan penduduk dari Jawa ke daerah seberang. Tiga tahun kemudian, dalam bulan Nopember 1905, diberangkatkan rombongan transmigrasi (kolonis) pertama sebanyak 155 keluarga yang berasal dari kota Kedu, Karang Anyar, Kebumen dan Purworejo ke Gedong Tataan, Karesidenan Lampung.

Sebelum diberangkatkan mereka dari Jawa, para migran menerima sebesar 20 gulden tiap keluarga, sedangkan makanan dan perumahan selama setahun pertama dijamin oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Dimulai dengan Gedong Tataan (1905) sebagai koloni pertama, kemudian disusul dengan koloni di Kepahiyang (1909), Matalintang (1919), Wonosobo (1921), Sukadana (1932), Tunggul Mulya dan Belitang (1937) dan seterusnya diadakan koloni-koloni untuk menampung migran dari Jawa.

Melalui program kolonisasi (1905-1942) pada jaman penjajahan Belanda secara keseluruhan dapat dipindahkan sebanyak 30.113 kepala keluarga atau 228.099 jiwa, dengan daerah tujuan (koloni) di Lampung yang terbesar yaitu 1.620 kepala keluarga atau 177.914 jiwa, kemudian disusul berturut-turut Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah yang masing-masing sebesar 6.133 kepala keluarga (22.803 jiwa) dan 2.901 kepala keluarga (12.119 jiwa).

Pemindahan penduduk di jaman kolonisasi (1905-1942) dalam jangka waktu keseluruhan 38 tahun dapatlah diperoleh rata-rata per tahun penduduk yang dipindahkan yaitu sebesar 6.003 jiwa. Melihat daerah asal migran pada jaman kolonisasi, daerah asal "lainnya" yang sebesar yaitu 52,43% atau 119.596 jiwa yang kebanyakan berasal dari eks buruh kontrak yang sudah habis kontrak kerjanya diperkebunan-perkebunan besar di Sumatera kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan daerah asal yang cukup besar, sumbangannya yaitu masing-masing sebesar 8.866 kepala keluarga atau 83.531 jiwa dan 2.612 kepala keluarga atau 22.314 jiwa.

Proses kolonisasi sulit untuk dapat dikatakan lancar. Hampir di sepanjang

dalam perkembangannya dan kadang-kadang kegagalan, seperti kejadian di daerah penempatan (koloni) Sulawesi Tengah tahun 1908 sebanyak 141 kepala keluarga diserang malaria. Dari pihak para migran (kolonis), kesulitan-kesulitan dimulai dari mobilitasnya yang rendah sampai pada ketidakmampuannya menjadi pionir di daerah penempatan, dan ketidakmampuan migran di dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Selain itu juga karena kebanyakan migran yang berasal dari eks buruh kontrak di mana mereka biasa diperkebunan-perkebunan yang sudah baik keadaannya. Dan dari pihak pemerintah kolonial kesulitan-kesulitan dimulai dari tidak adanya pengalaman sampai kurang mampunya menyediakan persiapan-persiapan teknis dan tidak adanya pembiayaan yang cukup, di mana biaya tiap keluarga tiap tahunnya ditaksir kira-kira sebesar 300 gulden, dan ini dianggap terlalu tinggi.

Kesulitan-kesulitan yang seperti tersebut di atas menjadi mereda, setelah perkembangan-perkembangan baru di daerah kolonisasi memungkinkan kehidupan yang lebih baik dan arus migran menjadi lebih besar, yaitu sesudah tahun 1930. Pada saat itu timbul sistem bawon dan mulai kelihatan gejala migran spontan, yang bersamaan pada waktu Pemerintah Kolonial Belanda memasukkan syarat-syarat seleksi yang lebih ketat untuk calon migran.

Program kolonisasi berakhir dengan masuknya Jepang di Indonesia (1942). Secara keseluruhan di dalam program kolonisasi dipindahkan sebanyak 30.113 kepala keluarga atau 228.099 jiwa. Angka-angka ini sesungguhnya sangat kecil dan tidak berarti terhadap masalah pertambahan penduduk di Jawa, hingga pada hakikatnya di dalam kebijaksanaan kolonisasi dengan masalah kependudukan didapati adanya ketidakserasian permasalahan, kemakmuran di Jawa tidak menjadi bertambah baik dengan adanya pengurangan penduduk sejumlah itu.

Pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia, karena pemerintah sibuk menghadapi peperangan-peperangan di Asia dan Pasifik, serta menghadapi perlawanan bersenjata di tanah air, penyelenggaraan pemindahan penduduk dari Jawa ke Luar Jawa terhenti. Tetapi pada masa itu masih ada perpindahan penduduk dalam jumlah kecil dari Jawa ke Luar Jawa dengan berbagai alasan dan pemindahan ini tidak merupakan upaya dari Pemerintah Jepang.

Sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu, dan sesudah revolusi fisik di Indonesia berakhir, usaha pemerintah dihadapkan pada masalah transmigrasi yang sudah dimulai sebelum Perang Dunia II akan dilanjutkan atau tidak. Keputusan untuk melanjutkan transmigrasi sesudah perang diambil pada awal tahun 1950, dan dalam bulan Desember 1950 diberangkatkan ke Sumatera

Secara keseluruhan realisasi pemindahan penduduk sesudah perang, periode tahun (1950-1968) berjumlah 96.378 kepala keluarga atau 399.726 jiwa, dengan daerah penempatan Sumatera Selatan yang terbesar yaitu 40.830 kepala keluarga atau 174.237 jiwa, kemudian disusul dengan Lampung sebanyak 34.450 kepala keluarga atau 40.638 jiwa. Dan dalam periode 1950-1968 transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah yang terbesar yaitu 34.264 kepala keluarga atau 143.933 jiwa, kemudian Jawa Timur 26.960 kepala keluarga atau 110.279 jiwa.

Kebijaksanaan pemindahan penduduk sesudah perang harus berbeda dengan kebijaksanaan sebelum perang. Yang pertama-tama perbedaan itu berlaku dalam tata cara yang telah digunakan untuk memperoleh calon migran. Keadaan sesudah kemerdekaan haruslah diadakan kebijaksanaan di dalam pelaksanaan pemindahan penduduk secara manusiawi, di mana penggunaan cara-cara migran yang bersifat paksaan harus di kesampingkan. Hal ini dikarenakan di Pulau Jawa sudah ada minat yang jauh lebih besar untuk bermigrasi bila dibandingkan dengan keadaan sebelum perang. Juga hal lain yang menggembirakan telah adanya "Transmigrasi Spontan," dan adanya kesadaran masyarakat banyak tentang perlunya program transmigrasi.

Pelaksanaan pemindahan penduduk dari Jawa ke Luar Jawa dilanjutkan terus. Pada Pelita I tahun 1969-1974 telah berhasil dipindahkan sebanyak 185.544 jiwa (40.068 kepala keluarga), dan seperti telah diterangkan sebelumnya dalam Pelita I strategi program transmigrasi berbeda dari periode-periode sebelumnya. Masalah transmigrasi dalam Pelita I dilihat dari dua segi. Yang pertama dari sudut masalah penyebaran penduduk dan yang kedua dari sudut pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan. Keduanya saling berkaitan, tetapi dalam Pelita I program transmigrasi akan dikaitkan dengan proyek-proyek pembangunan di daerah penerima di Luar Jawa. Dan direncanakan agar "transmigrasi" memegang peranan yang sangat penting sebagai unsur penunjang pembangunan proyek-proyek yang telah diprioritaskan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Kemudian pelaksanaan transmigrasi selama periode Repelita II (1974-1979), secara keseluruhan telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan. Pelaksanaan dan penempatan transmigrasi selama Repelita II secara kuantitatif sebanyak 72.041 kepala keluarga atau sekitar 318.388 jiwa. Walaupun jumlah tersebut belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Repelita II, namun bila dibandingkan dengan pelaksanaan dalam Repelita I telah menunjukkan kenaikan yang cukup berarti.

Usaha transmigrasi akan terus ditingkatkan pemerintah, seperti dalam

target tahun ke-1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing sebanyak 50.000 kepala keluarga, 75.000 kepala keluarga, 100.000 kepala keluarga, 125.000 kepala keluarga dan 150.000 kepala keluarga. Target ini adalah dua kali lebih besar dari jumlah kepala keluarga yang ditargetkan selama Pelita II. Jumlah kepala keluarga yang ditargetkan ini tidak semuanya akan dipindahkan oleh pemerintah. Pemerintah hanya akan membiayai program transmigrasi umum yang hanya akan mencakup sebagian dari 500.000 kepala keluarga. Sedangkan sisanya diharapkan untuk pindah ke pulau lain secara spontan yang disokong oleh keluarga mereka atau oleh organisasi swasta yang bergerak dalam kegiatan sosial. Selama Pelita II, dari anggaran yang ditargetkan untuk 250.000 kepala keluarga hanya tersedia untuk 80.000 kepala keluarga yang dapat ditransmigrasikan, dan sisanya diharapkan untuk berpindah secara spontan. Dalam Pelita III sekarang, anggaran yang tersedia juga tidak diharapkan untuk bisa mencakup semua target. Untuk mencapai target, maka anggaran untuk sisa transmigrasi yang dipindahkan harus tergantung pada sumber lain seperti dari bantuan luar negeri, investasi dari dalam dan luar negeri serta partisipasi dari masyarakat Indonesia baik sebagai individu maupun melalui organisasi. Migrasi spontan ini makin bertambah selama Pelita III. Hal ini besar kemungkinannya akan berhasil karena besarnya perhatian untuk menanam modal yang besar di Luar Jawa dari luar negeri, juga investasi dalam negeri sendiri. Dalam hubungannya dengan penyediaan tenaga kerja untuk proyek-proyek ini, koordinasi dan pengurus yang lebih baik di antara instansi-instansi yang berwenang mengenai hal ini harus dilakukan untuk mempercepat proses penyelenggaraannya.

TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Pelaksanaan program transmigrasi oleh Pemerintah Indonesia sampai pada saat sekarang dapat kita bagi ke dalam 3 masa yaitu:

- (i) Masa sebelum Pelita tahun 1950-1968;
- (ii) Masa Pelita I tahun 1969/1970 - 1973/1974;
- (iii) Masa Pelita II tahun 1974/1975 - 1978/1979.

Antara tahun 1950-1968 pemerintah berhasil memindahkan 96.378 keluarga transmigrasi dari Pulau Jawa ke Luar Jawa, sedangkan pada Pelita I dan II realisasi pelaksanaan transmigrasi masing-masing berjumlah 40.068 dan 72.041 keluarga (lihat Tabel 1). Pada masa sebelum Pelita daerah penerima transmigrasi terbesar adalah Sumatera Selatan dan Lampung yang masing-masing menyerap 42,36% dan 35,74% dari jumlah 96.378 transmigran. Sedangkan pada Pelita I kontribusi kedua daerah tersebut sebagai penerima transmigrasi mulai menurun, menjadi masing-masing 16,86% dan 28,77%.

Tabel 1

REALISASI PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DALAM PRA PELITA
 PELITA I DAN PELITA II MENURUT DAERAH PENEMPATAN (dalam kepala keluarga)

Daerah Penempatan	Pra Pelita		Pelita I		Pelita II	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Daerah Istimewa Aceh	50	0,05	-	-	800	1,11
2. Sumatera Utara	3.184	3,30	200	0,50	500	0,69
3. Sumatera Barat	2.965	3,08	450	1,12	4.950	6,87
4. Riau	294	0,31	500	1,25	1.152	1,60
5. Jambi	113	0,12	2.450	6,11	12.612	17,51
6. Sumatera Selatan	40.830	42,36	6.754	16,86	12.102	16,80
7. Lampung	34.450	35,74	11.529	28,77	6.313	8,76
8. Bengkulu	-	-	1.300	3,24	5.347	7,42
9. Kalimantan Barat	1.962	2,04	952	2,38	2.100	2,92
10. Kalimantan Selatan	3.130	3,25	1.490	3,72	4.615	6,41
11. Kalimantan Tengah	819	0,85	1.253	3,13	800	1,11
12. Kalimantan Timur	3.939	4,09	2.075	5,18	3.400	4,72
13. Sulawesi Utara	1.460	1,51	760	1,90	950	1,32
14. Sulawesi Tengah	1.378	1,43	3.452	8,62	7.600	10,55
15. Sulawesi Tenggara	-	-	2.012	5,02	4.260	5,91
16. Sulawesi Selatan	949	0,98	4.441	11,08	3.750	5,20
17. Nusa Tenggara Timur	168	0,17	-	-	-	-
18. Maluku	432	0,45	350	0,87	200	0,20
19. Irian Jaya	255	0,26	100	0,25	590	0,82
Jumlah	96.378	100,00	40.068	100,00	72.041	100,00

Sumber: Direktorat Jenderal Transmigrasi, *Data Penempatan Transmigrasi*, 1980.

terbesar. Tetapi pada masa Pelita II Sumatera Selatan dan Lampung hanya menerima 16,80% dan 8,76% keluarga transmigran. Hal ini disebabkan karena tingginya pertambahan penduduk di kedua daerah tersebut terutama di Propinsi Lampung yang perkembangannya hampir 4,5% per tahun, yang menyebabkan pemerintah merasa perlu untuk membuka lokasi-lokasi transmigrasi di daerah lain yang masih jarang penduduknya. Dalam Pelita I Sulawesi Selatan muncul sebagai daerah penerima transmigran terbesar ketiga dengan 4.441 keluarga atau 11,08%.

Walaupun selama pra-Pelita jumlah transmigran lebih dari 96.000 di Indonesia, namun rata-rata per tahun hanyalah 5.073 keluarga, rata-rata ini jauh lebih kecil jika dibandingkan rata-rata per tahun transmigran dari Pelita I dan Pelita II yang masing-masing rata-ratanya adalah 8.014 dan 14.409

untuk Sumatera Selatan yaitu 2.149 orang yang disusul Lampung 1.814 orang. Walaupun dalam Pelita I jumlah transmigran untuk Lampung tampaknya lebih kecil dari pra-Pelita namun rata-rata per tahunnya adalah lebih besar yaitu 2.306 keluarga. Rata-rata untuk Lampung ini juga merupakan yang terbesar pada masa Pelita I yang disusul oleh Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 1.351 dan 899 keluarga. Pada Pelita II Jambi sebagai propinsi yang menerima transmigran terbesar dengan rata-rata 2.523 keluarga yang disusul oleh Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah dengan rata-rata masing-masing sebesar 2.421 dan 1.520 keluarga.

Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan transmigrasi perlu dilihat pula perbandingan antara jumlah yang telah ditargetkan dan realisasinya. Sebelum Pelita, kecuali adanya beberapa angka disitir jumlah penduduk yang diinginkan untuk dipindahkan, pemerintah belum menetapkan berapa jumlah target yang harus dicapai dalam pelaksanaan transmigrasi. Dengan tidak adanya target tidak dapat dilakukan evaluasi sampai seberapa jauh keberhasilan pemerintah dalam pemindahan penduduk ini dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Karena itu di sini hanya akan diulas tingkat pencapaian target dari realisasi pemindahan penduduk selama Pelita I dan Pelita II.

Seperti terlihat pada Tabel 2 pemerintah menargetkan sebanyak 40.916 kepala keluarga transmigrasi pada Pelita I. Tetapi dalam realisasinya men-

Tabel 2

TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN TRANSMIGRASI SELAMA PELITA I

Tahun	Target (K.K.)	Realisasi		$\frac{3}{2} \times 100\%$
		K.K.	Jiwa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969/1970	4.839	3.933	17.848	81,28
1970/1971	3.865	4.438	19.985	114,82
1971/1972	4.600	4.171	18.870	90,67
1972/1973	11.200	11.341	51.918	101,02
1973/1974	16.412	22.212*	101.782	135,34
Pelita I	40.916	46.068	210.403	112,59

*Termasuk Transmigrasi Banpres.

capai sebanyak 46.068 kepala keluarga atau 210.403 jiwa yang berarti realisasi tersebut 13% lebih tinggi daripada target.

Pada tahun anggaran 1969/1970 realisasi pemindahan penduduk hanya mencapai 81% dari target. Namun demikian kekurangan realisasi ini tertutup pada tahun anggaran 1970/1971, yang realisasinya 15% lebih besar daripada target yang sudah ditentukan. Pada tahun anggaran 1971/1972 realisasi hanya mencapai 91% dari target, sedang pada tahun anggaran berikutnya, jumlah yang ditargetkan dapat dicapai, dengan realisasi 1% di atasnya. Pada tahun anggaran terakhir Pelita I (tahun 1973/1974) realisasi transmigrasi jauh lebih besar di atas target, di mana dapat direalisasi pemindahan penduduk sebanyak 22.212 kepala keluarga atau 35% di atas target yang ditetapkan sebanyak 16.412 kepala keluarga. Besarnya jumlah penduduk yang dapat dipindahkan dalam anggaran 1973/1974 ini disebabkan adanya transmigrasi yang dibiayai dari Bantuan Presiden (Banpres).

Kalau selama Pelita I, pemerintah dapat melampaui target jumlah transmigrasi yang harus dipindahkan, dalam Pelita II, pemerintah hanya berhasil melaksanakan transmigrasi sebanyak 72.041 kepala keluarga dari 81.100 kepala keluarga yang ditargetkan (Tabel 3). Ini berarti bahwa target dalam Pelita II hanya tercapai 89%. Walaupun demikian secara absolut jumlah transmigran yang diberangkatkan selama Pelita II bertambah sebanyak 56,38% dari Pelita I. Hal ini menunjukkan makin lebih dianggap pentingnya peranan transmigrasi dan lebih besarnya kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan Pelita II.

Tabel 3

TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN TRANSMIGRASI SELAMA PELITA II

Tahun	Target (K.K.)	Realisasi		$\frac{3}{2} \times 100\%$
		K.K.	Jiwa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1974/1975	11.000	11.000	46.613	100,00
1975/1976	8.100	8.100	34.343	100,00
1976/1977	13.910	13.910	63.237	100,00
1977/1978	21.090	22.849	101.042	108,81
1978/1979	27.000	16.182	73.153	59,93
Pelita II	81.100	72.041	318.388	88,95

Untuk tahun-tahun anggaran 1974/1975-1976/1977 pemerintah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan pada tahun anggaran 1977/1978, dari 21.090 kepala keluarga transmigrasi yang ditargetkan, pemerintah berhasil melaksanakan transmigrasi terhadap 22.849 kepala keluarga transmigran atau hampir 9% di atas target. Tetapi tahun 1978/1979 dari sejumlah 27.000 kepala keluarga transmigran yang ditargetkan, hanya 59,93% yang berhasil dilaksanakan. Hal ini mungkin disebabkan karena belum siapnya daerah penerima serta adanya Knop-1978 yang sedikit banyaknya mempengaruhi pelaksanaan dari transmigrasi.

Lampiran

Tabel 1

DISTRIBUSI PENDUDUK INDONESIA PER PULAU SERTA PERTUMBUHANNYA

Daerah	Penduduk				Rata-rata Pertumbuhan Penduduk (dalam persentase)						
	1930		1961		1971		1980				
	Pendu-duk (juta)	%	Pendu-duk (juta)	%	Pendu-duk (juta)	%	Pendu-duk (juta)				
Jawa dan Madura	41,7	68,7	63,0	65,0	76,1	63,8	91,2	61,9	1,3	1,9	2,0
Sumatera	8,2	13,5	15,7	16,2	20,8	17,5	28,0	19,0	2,1	2,9	3,3
Kalimantan	2,2	3,6	4,1	4,2	5,2	4,4	6,7	4,5	2,1	2,4	2,8
Sulawesi	4,2	6,9	7,1	7,3	8,5	7,1	10,4	7,1	1,7	1,8	2,2
Pulau-pulau Lain	4,4	7,3	7,1	7,3	8,6	7,2	11,1	7,5	1,6	2,0	2,8
Indonesia	60,7	100,0	97,0	100,0	119,2	100,0	147,5	100,0	1,5	2,1	2,3

Catatan: Tidak termasuk Propinsi Timor Timur 1971.

Sumber: Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 2

KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA (BANYAKNYA PENDUDUK INDONESIA PER KM²) MENURUT PULAU 1930-1980

Daerah	Luas (Km ²)		Kepadatan Penduduk per Km ² **			
	Km ²	Persentase	1930**	1961**	1971**	1980**
Jawa dan Madura	132.187	6,89	315	476	576	690
Sumatera	473.606	24,67	17	33	44	59
Kalimantan	539.460	28,11	4	8	10	12
Sulawesi	189.216	9,85	22	38	45	55
Pulau-pulau Lain	584.974	30,48	8	12	15	19
Indonesia	1.919.443	100,00	32	51	62	77

Catatan: *Luas dihitung dengan pool planimeter, hasilnya merupakan luas proyeksi. Jawatan Topografi TNI-AD.

Tabel 3

PENDUDUK, LUAS DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KM²

INDONESIA

Propinsi	Penduduk	% dari Jumlah Penduduk	Luas ¹⁾ Km ²	% dari luas seluruh Indonesia	Kepadatan Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Daerah Istimewa Aceh	2.611.271	1,77	55.392	2,88	47
2. Sumatera Utara	8.360.894	5,67	70.787	3,69	118
3. Sumatera Barat	3.406.816	2,31	49.778	2,59	68
4. Riau	2.168.535	1,47	94.562	4,93	23
5. Jambi	1.445.994	0,98	44.924	2,34	32
6. Sumatera Selatan	4.629.801	3,14	103.688	5,40	45
7. Bengkulu	768.064	0,52	21.168	1,10	36
8. Lampung	4.624.785	3,14	33.307	1,74	139
Sumatera	28.016.160	19,00	473.606	24,67	59
9. DKI Jakarta	6.503.449	4,41	590	0,03	11.023
10. Jawa Barat	27.453.525	18,61	46.300	2,41	593
11. Jawa Tengah	25.372.889	17,20	34.206	1,78	742
12. Daerah Istimewa Yogyakarta	2.750.813	1,87	3.169	0,17	868
13. Jawa Timur	29.188.852	19,79	47.922	2,50	609
Jawa	91.269.528	61,88	132.187	6,89	690
14. Bali	2.469.930	1,67	5.561	0,29	444
15. Nusa Tenggara Barat	2.724.664	1,85	20.177	1,05	135
16. Nusa Tenggara Timur	2.737.166	1,86	47.876	2,49	57
17. Timor Timur	555.350	0,38	14.874	0,78	37
Nusa Tenggara	8.487.110	5,76	88.488	4,61	96
18. Kalimantan Barat	2.486.068	1,68	146.760	7,65	17
19. Kalimantan Tengah	954.353	0,65	152.600	7,95	6
20. Kalimantan Selatan	2.064.649	1,40	37.660	1,96	55
21. Kalimantan Timur	1.218.016	0,83	202.440	10,55	6
Kalimantan	6.723.086	4,56	539.460	28,11	12
22. Sulawesi Utara	2.115.384	1,43	19.023	0,99	111
23. Sulawesi Tengah	1.289.635	0,87	69.726	3,63	18
24. Sulawesi Selatan	6.062.212	4,11	72.781	3,79	83
25. Sulawesi Tenggara	942.302	0,64	27.686	1,44	34
Sulawesi	10.409.533	7,05	189.216	9,85	55
26. Maluku	1.411.006	0,96	74.505	3,88	19
27. Irian Jaya	1.173.875	0,79	421.981	21,99	3
Maluku dan Irian Jaya	2.584.881	1,75	496.486	25,87	5
Jumlah	147.490.298	100,00	1.919.443	100,00	77

Catatan: ¹⁾ Dari Hasil Sensus Penduduk 1980, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Sumber: Jawatan Topografi TNI-AD.

RUJUKAN:

1. Biro Pusat Statistik, *Tingkat dan Perkembangan Migrasi, Fertilitas dan Mortalitas, Agustus 1979*.
2. Biro Pusat Statistik, *Komponen Tanah Usaha Tani dan Usaha Pertanian di Indonesia, Juli 1977*.
3. Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia, Publikasi Sensus Penduduk 1971, Serie D*.
4. Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Publikasi Sensus Penduduk 1971, Serie E*.
5. Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Publikasi Sensus Penduduk 1980, Serie L*.
6. Biro Pusat Statistik, *Keterangan Demografis Penduduk Indonesia, Survey Penduduk Antar Sensus (Supas) 1976*.
7. Direktorat Jenderal Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Daftar Realisasi Pemandahan dan Penempatan Transmigrasi Pelita I dan II*.
8. Direktorat Jenderal Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Data Penempatan Transmigrasi Pelita I, II dan III, Maret 198*
9. Direktorat Jenderal Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Realisasi Penempatan Transmigrasi dari Kolonisasi (1905) sampai Pelita I*.
10. Direktorat Jenderal Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Pelaksanaan Program Transmigrasi Pelita II, Jakarta, Januari 1980*.
11. Direktorat Jenderal Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Kumpulan Peraturan Transmigrasi*.
12. Heren, H.J., *Transmigrasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 1979.
13. Han Redmana, "Perpindahan Penduduk di Indonesia," *Majalah Demografis Indonesia*, No. 7, Tahun IV, 1977.
14. Hardjono, Y.M., *Transmigration in Indonesia*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, Jakarta, London, Melbourne, 1977.
15. Sri Ediswasono, Ph.D., "Transmigrasi dalam Perspektif Pembangunan," *harian Indonesia Raya*, 3 Agustus 1970.
16. Suharso, *Pola Perpindahan Penduduk dan Urbanisasi di Jawa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Proses Kejadian*. Ringkasan disertasi yang dipertahankan di Universitas Gajah Mada, 12 September 1978.